

# Persepsi Petani Terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri

Rizki Fitriyan Hariyadi<sup>1</sup> dan Luh Putu Suciati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember; [rizkifh1@gmail.com](mailto:rizkifh1@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember; [suciati.faperta@unej.ac.id](mailto:suciati.faperta@unej.ac.id)

\* Correspondence: [rizkifh1@gmail.com](mailto:rizkifh1@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the perceptions of farmers in collaborating on the rehabilitation of Meru Betiri National Park. ) The chosen location is in the Reubetiri National Park Rehabilitation Zone in Wonoasri Village, Tempurejo District, National Park Management Section (SPTN) II, Meru Betiri National Park. The consideration in choosing a location is because the area is one of the locations of the PE program (Ecosystem Recovery). The research method used is descriptive-analytic method. The method of data collection is done by interviewing using questionnaires, observation and documentation. Respondents in this study were 40 farmers who collaborated in rehabilitation land management. Data analysis used a scoring analysis of perceptions of farmers in collaborative rehabilitation of land management. The results showed the overall level of perceptions of farmers obtained a value of 76.51 which means included in the good category. In the four indicators there are several differences in the assessment of each indicator, where the indicator of the cooperation mechanism is in the good category of 12.6, then the benefit indicator of cooperation falls into the fairly good category of 8.75. While the indicators of farmers' obligations are in the good category, which is 38.33, then the indicators of the farmers' rights are also in the good category, which is 16.83. Although farmers' perceptions of collaborative rehabilitation management show a good category, however, farmers' awareness of cooperation agreement is still relatively low due to the fact that many farmers intentionally still violate a number of rules that have been mutually agreed upon between farmers and national parks. Like the example of removing and deliberately treating trees or seeds that are planted so that the plants die, because they assume that if the main plants grow well, the canopy of the leaves will cover annual crops or intercropping so that the growth is not good, the yield is not optimal and their income decreases*

**Keywords:** *Entrepreneurship, Entrepreneurial Potential, Meru Betiri National Park*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri. ). Lokasi yang dipilih adalah di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Merubetiri di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II Taman Nasional Meru Betiri. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah lokasi program PE (Pemulihan Ekosistem). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuisioner, observasi dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini sebanyak 40 orang petani yang melakukan kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi. Analisis data menggunakan analisis skoring persepsi petani dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persepsi petani secara keseluruhan diperoleh nilai sebesar 76,51 yang artinya termasuk dalam kategori baik. Pada keempat indikator tersebut terdapat beberapa perbedaan penilaian pada tiap-tiap indikator, dimana indikator mekanisme kerjasama masuk dalam kategori baik yaitu sebesar 12,6, kemudian indikator manfaat kerjasama masuk dalam kategori

cukup baik yaitu sebesar 8,75. Sedangkan indikator kewajiban petani masuk dalam kategori baik yaitu sebesar 38,33, kemudian indikator hak petanu juga masuk pada kategori baik yaitu sebesar 16,83. Meskipun persepsi petani terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi menunjukkan kategori yang baik, Akan tetapi, kesadaran petani terhadap kesepahaman kerjasama masih relatif rendah karena kenyataannya banyak petani yang secara sengaja masih melanggar sejumlah aturan yang telah disepakati bersama antara petani dengan pihak taman nasional. Seperti contoh mencabut dan secara sengaja memperlakukan pohon ataupun bibit yang baru ditanam agar tanaman tersebut mati, karena mereka menganggap apabila tanaman pokok tumbuh bagus, kanopi daunnya akan menutupi tanaman semusim atau tanaman sela sehingga pertumbuhannya kurang bagus, hasil panen tidak optimal dan pendapatan mereka berkurang

**Kata Kunci :** Persepsi, Lahan Rehabilitasi, Taman Nasional Meru Betiri

## 1. Pendahuluan

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dan Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut Megadiversity Country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam perkembangannya di alam, hutan berfungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, bahkan hutan memberikan manfaat yang tidak ternilai bagi manusia dan makhluk hidup lain. Hutan perlu dikelola secara baik agar keberlanjutannya dapat terjamin. Untuk menjamin keberlanjutan hutan dalam menjaga keseimbangan manfaat lingkungan (air, tanah, iklim, flora dan fauna), manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi maka perlu ditetapkan dan dipertahankan kecukupan kawasan hutan dalam suatu ekosistem daerah aliran sungai. Hutan memainkan peranan penting di alam, terutama dalam hal pengendali CO<sub>2</sub> yang erat kaitannya dengan isu global bagi kepentingan internasional (Wanggai, 2009:30).

Sumberdaya alam berupa hutan merupakan tempat hidup bagi masyarakat sekitar hutan yang hidup bergantung pada sumberdaya tersebut. Mereka dikenal sebagai forest dependent people yang mengandalkan hutan tidak saja sebagai sumber energi tetapi sebagai tempat untuk hidup. Untuk memanfaatkan hutan biasanya mereka mengacu pada aturan-aturan yang disusun secara turun temurun dan berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat sekitar hutan. Untuk itu ada pengaturan yang secara istimewa lekat pada negara guna mengelola sumberdaya alam yang ada. Dalam hal Tabel 3.2 Penilaian Manfaat kerjasama dalam dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri.

Negara mengatur sumberdaya alam, aturan yang berlaku secara adat atau hak ulayat biasanya menjadi tidak valid lagi keberlakuannya. Salah satu pengaturan yang dibuat negara untuk mengelola sumberdaya hutan adalah dengan membuat Taman Nasional sebagai wilayah konservasi. Tujuan utama pendirian Taman Nasional di samping untuk konservasi binatang atau tanaman tertentu adalah juga sebagai kawasan yang berkontribusi positif untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya, (Purwanto, 2005).

Berdasarkan data diatas, terdapat berbagai kabupaten yang sebagian wilayahnya merupakan daerah Taman Nasional. Kabupten Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang merupakan daerah dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sedangkan Taman Nasional Meru Betiri berada pada daerah Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Taman Nasional Baluran berada di Kabupaten Situbondo. Taman Nasional Alas Purwo berada di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data diatas, Kabupaten yang wilayah

Taman Nasional paling luas yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Jember dimana Kabupaten tersebut merupakan daerah dari Taman Nasional Meru Betiri.

Tekanan terhadap sumberdaya hutan cenderung semakin meningkat. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab utama kerusakan sumber daya hutan di Indonesia. Terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh kebakaran dan perambahan hutan, illegal logging dan illegal trading yang antara lain didorong oleh adanya permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya di pasar lokal, nasional dan global, adanya konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dan keperluan lain; adanya penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan dan pemanenan hasil hutan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL). Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Indonesia mendorong berkembangnya isu sebagai penyumbang emisi karbon yang cukup signifikan. Di sisi lain, sebagaimana negara berkembang lainnya, hutan masih diposisikan sebagai sumberdaya pembangunan ekonomi yang dikhawatirkan akan mempercepat laju deforestasi dan degradasi hutan yang memperbesar emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan (Badan Litbang Kehutanan dan Taman Nasional Merubetiri, 2011).

Berdasarkan data diatas, terdapat berbagai daerah Taman Nasional yang memiliki lahan kritis. Akan tetapi, luas lahan kritis dari TN Baluran, TN Bromo Tengger Semeru, dan TN Alas Purwo dari tahun ke tahun semakin menyusut. Sedangkan TN Meru Betiri dan TAHURA R. Soerjo dari tahun ke tahun lahan kritis semakin luas. TN Meru Betiri dari luas lahan kritis tahun 2012-2015 yaitu sebesar 2.733,50 ha, sedangkan tahun 2016 semakin meluas sebesar 2.799,08 ha. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi lahan pada lahan kritis yang ada pada TN Meru Betiri.

Deforestasi dan degradasi hutan salahsatunya juga terjadi pada Taman Nasional Merubetiri. Taman Nasional Meru Betiri memiliki luas areal 58.000 ha meliputi daratan seluas 57.155 ha dan perairan 845 ha terletak di ujung timur Jawa Timur bagian selatan yaitu di Kabupaten Jember dan Banyuwangi. TNMB mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi strategis, karena di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati (mega biodiversity) flora dan fauna serta memiliki fungsi penyangga untuk mendukung kehidupan lain. Dengan fungsinya yang sedemikian penting itu, maka rehabilitasi kawasan TNMB harus dilakukan karena pada tahun 1998 (awal reformasi) kawasan ini telah mengalami illegal logging dan penjarahan besar-besaran khususnya terhadap hutan jati serta mengalami okupasi oleh oknum masyarakat (Rujito, 2016).

Berdasarkan data diatas, Pembagian zona kawasan konservasi Jawa Timur pada TN Meru Betiri yaitu terdiri dari Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, Zona Rehabilitasi, dan Zona khusus. Zona rehabilitasi TN Meru Betiri yaitu seluas 2.779,08. Luas Zona Rehabilitasi ini sesuai dengan luas lahan kritis di TN Meru Betiri.

Menurut penelitian Rujito (2016), terjadinya pencurian kayu dan perambahan hutan di kawasan TNMB tidak bisa dilepaskan dari kondisi taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan yang masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonominya. Tahun 2001 Balai TNMB telah berusaha melakukan rehabilitasi dan penyelamatan kawasan TNMB dengan melibatkan masyarakat melalui kemitraan rehabilitasi dengan tujuan untuk : (a) Merehabilitasi kawasan yang rusak melalui pelibatan masyarakat (b) menjaga kelestarian hutan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut memiliki kawasan TNMB.

Kegiatan pelibatan masyarakat dalam program rehabilitasi kawasan dilakukan dengan cara melibatkan warga dalam kerjasama dengan TNMB melalui pemberian hak

pengelolaan atas lahan dalam luasan minimal (0,25 ha) dan petani diwajibkan lahan tersebut dengan tanaman pokok yang sudah ditentukan oleh TNMB dan sementara tanaman pokok belum tumbuh besar petani diperkenankan menanam lahan tersebut dengan tanaman pertanian agar meningkat pendapatannya. Namun pemberian kepercayaan kepada komunitas masyarakat sekitar hutan untuk ikut mengelola hutan secara bertanggung jawab tidaklah selalu berjalan baik. Kondisi juga terjadi di lahan rehabilitasi kawasan TNMB di mana target perkembangan tanaman sesuai waktunya belum dapat dipenuhi. Aturan yang wajib dilakukan oleh masyarakat sekitar Taman Nasional antara lain selain menanam tanaman semusim (padi, jagung, kacang tanah, kacang panjang, peje dan singkong), diwajibkan menanam tumbuhan kayu-kayuan (kedawung, petai, kemiri, durian, mengkudu, nangka, asam, pisang, dan pakem). Kondisi kawasan penyangga yang telah direhabilitasi oleh masyarakat sekitar kawasan dengan tanaman campuran atau lebih diarahkan ke agroforestry.

Masyarakat mengemukakan alasan mengapa hasil tanaman pokok kurang dimanfaatkan, hal tersebut karena masyarakat berpendapat bahwa tanaman pokok tersebut kurang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta termasuk tanaman tahunan sehingga hanya dapat menikmati hasilnya sekali dalam setahun. Selain itu bibit tanaman pokok yang diberikan kurang sesuai dengan keadaan tanah dan lingkungan sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Masyarakat cenderung memilih memilih tanaman palawija yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan tidak perlu menunggu lama untuk panen. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian bagaimana persepsi masyarakat hutan/petani dalam bekerjasama dengan TNMB terkait dengan menanam tanaman pokok.

## 2. Metode

Penelitian dilakukan di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Merubetiri di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II Taman Nasional Meru Betiri. Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari petani lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari proses wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui persepsi petani lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri yaitu dengan menggunakan skala likert. Persepsi petani dalam mengelola lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri diperoleh melalui pengajuan pertanyaan yang disajikan dalam bentuk kuisioner, kemudian dari jawaban tersebut diberikan skor. Analisis yang digunakan untuk mengukur persepsi petani dalam mengelola lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dengan menggunakan skala likert yang kemudian akan diperoleh persepsi petani lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri.

**Tabel 1.** Kriteria Persepsi Petani Tentang Kerjasama Pengelolaan Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri

Kriteria	Skoring Kriteria
Mekanisme	Peraturan pengelolaan rehabilitasi lahan (1-5) Tata cara dalam pengelolaan lahan (1-5) Sosialisai pihak Taman Nasional dengan petani (1-5)
Manfaat	Meningkatkan pendapatan petani(1-5) Pemulihan ekosistem TNMB (1-5)
Hak	Berhak memanen buah tanaman pokok (1-5) Berhak hasil panen tanaman sela (1-5) Berhak menerima pembinaan dan bimbingan TN (1-5) Berhak menerima bantuan bibit Pemulihan Ekosistem (1-5)
Kewajiban	Kewajiban Membentuk Kelompok Tani (1-5) Kewajiban Melakukan penanaman tanaman pokok (1-5) Kewajiban Memelihara tanaman pokok (1-5) Kewajiban menjaga dan melindungi tanaman pokok (1-5) Kewajiban melapor apabila ada tindak pidana kehutanan (1-5) Kewajiban tidak melakukan perusakan pada tanaman pokok (1-5) Kewajiban tidak merubah fungsi hutan menjadi lahan persawahan (1-5) Kewajiban mengelola tanaman pokok sesuai perjanjian (1-5) Kewajiban bersedia menerima sanksi apabila melanggar perjanjian (1-5)

Sumber: Modifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Pemulihan Ekosistem di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri (2017)

Hasil skor dari jawaban tersebut, kemudian dibuat skala melalui perhitungan nilai rentang skala sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{b}$$

Keterangan =

RS : Rentang Skala

m : Angka tertinggi dalam pengukuran

n : Angka terendah dalam pengukuran

b : Banyaknya kelas yang dibentuk

Dari rumus tersebut dapat diperoleh :

$$RS = \frac{(18 \times 5) - (18 \times 1)}{5}$$

$$= 14$$

Melalui nilai interval, dapat diketahui tingkatan persepsi petani melalui penilaian respon terhadap setiap unsur. Data yang diperoleh dari hasil kuisioner kemudian dicari nilai total skor dari setiap pertanyaan dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap jawaban responden. Penentuan tingkat persepsi petani dikelompokkan secara ordinal menjadi lima kategori yakni sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah seperti tabel di atas, sehingga dapat diketahui tingkat persepsi petani dari tiap responden. Kriteria penilaian persepsi petani lahan rehab terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi :

1. persepsi petani terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi tidak baik (skor 18-32)
2. persepsi petani terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi kurang baik (skor 33-47)

3. persepsi petani terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi cukup baik (skor 48-62)
4. persepsi petani terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi baik (skor 63-77)
5. persepsi petani terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi sangat baik (skor 78-92)

### 3. Hasil Analisis dan Pembahasan

Kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri, khususnya di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri, sejarahnya mulai pada masa reformasi yaitu pada tahun 1997-1998. Saat itu terjadi perubahan besar dalam tatanan politik dan pemerintahan Indonesia. Sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri mengartikan reformasi secara keliru. Mereka berpendapat bahwa reformasi diartikan sebagai penjarahan besar-besaran di kawasan hutan di Taman Nasional Meru Betiri, yang berfungsi sebagai zona rimba, ditebang habis oleh masyarakat. Kemudian lahan bekas hutan ini ditanami berbagai jenis tanaman pangan dan palawija oleh masyarakat desa hutan. Hutan di Taman nasional Meru Betiri yaitu zona rimba pada akhirnya berubah menjadi lahan pertanian masyarakat. Pihak Taman Nasional berkeyakinan bahwa kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keberadaan zona inti, karena jarak masyarakat dengan zona inti menjadi lebih dekat. Oleh karena itu, pihak Taman Nasional yang sangat berkepentingan terhadap masalah tersebut, mengusulkan kepada pemerintah agar areal hutan tersebut dijadikan sebagai “zona rehabilitasi”.

Tingkat persepsi petani dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dinilai dari beberapa indikator yang sudah ditentukan. Terdapat 4 indikator yang untuk menentukan tingkat persepsi petani yaitu mekanisme kerjasama, manfaat kerjasama, hak petani dan kewajiban petani. Setiap indikator memiliki beberapa kriteria yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran dalam penentuan tingkat persepsi. Setiap kriteria pengukuran tersebut akan diberi bobot penilaian yang kemudian akan berfungsi sebagai perhitungan skor persepsi petani dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri. Penilaian dinyatakan dalam skor dengan skor 1 sampai 5, dengan kategori skor 1 menunjukkan tingkat tidak baik, skor 2 menunjukkan tingkat kurang baik, skor 3 menunjukkan tingkat cukup baik, skor 4 menunjukkan tingkat baik, skor 5 menunjukkan tingkat sangat baik.

#### 1. Mekanisme Kerjasama

Mekanisme kerjasama merupakan cara untuk mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati bersama. Mekanisme kerjasama sangat penting dalam kegiatan kerjasama antara pihak Taman Nasional dengan petani lahan rehab agar tujuan utama dapat tercapai yaitu memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahannya sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Mekanisme kerjasama diharapkan dapat memudahkan petani dalam mengelola lahan rehabilitasi. Indikator mekanisme kerjasama mempunyai 3 kriteria penilaian yaitu Peraturan pengelolaan lahan rehab, Cara pengelolaan lahan rehab dan Sosialisasi pihak Taman Nasional. Berikut merupakan tabel penilaian dari indikator mekanisme kerjasama tersaji dalam tabel 2.

**Tabel 2.** Penilaian Mekanisme kerjasama dalam dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri

Kriteria Penilaian	Nilai					Rata-rata Skor
	1 (Tidak Baik)	2 (Kurang Baik)	3 (Cukup Baik)	4 (Baik)	5 (sangat baik)	
Peraturan Pengelolaan Lahan Rehab	0%	0%	10%	70%	20%	4,1
Cara Pengelolaan Lahan Rehab	0%	0%	10%	65%	25%	4,2
Sosialisasi Pihak Taman Nasional	0%	0%	5%	55%	40%	4,4
<b>Total</b>						<b>12,6</b>

Kriteria pengambilan keputusan kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dari indikator mekanisme kerjasama:

1. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap mekanisme kerjasama tidak baik (skor 3-5)
2. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap mekanisme kerjasama kurang baik (skor 6-8)
3. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap mekanisme kerjasama cukup baik (skor 9-11)
4. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap mekanisme kerjasama baik (skor 12-14)
5. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap mekanisme kerjasama sangat baik (skor 15-17)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan penilaian terhadap mekanisme kerjasama dengan melihat tiga kriteria penilaian yaitu 1) Peraturan pengelolaan lahan rehab, 2) Cara pengelolaan lahan rehab, 3) Sosialisasi pihak Taman Nasional. Hasil penilaian yang telah dirata-rata dan kemudian dijumlahkan maka hasil penjumlahan skor penilain yaitu 12,6. Artinya skor 12,6 tersebut masuk dalam sebaik yaitu antara skor 12-14.

Pada kriteria pertama, peraturan pengelolaan lahan rehab, persentase paling tinggi yaitu sebesar 70% pada skor nilai 4 yang artinya masuk pada kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa petani mengaku bahwa peraturan pengelolaan lahan rehab sangat penting digunakan dalam kerjasama dan harus ditaati oleh seluruh petani lahan rehab dengan usaha maksimal. Peraturan tersebut nantinya menjadi pedoman petani untuk mengelola lahan rehab sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Peraturan pengelolaan lahan rehab dituangkan dalam nota kesepakatan dimana pihak ke-1 adalah Taman Nasional Meru Betiri, sedangkan pihak ke-2 adalah petani lahan rehab. Peraturan pengelolaan lahan rehab di dalamnya terdiri dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Peraturan pengelolaan tertuang dalam surat pernyataan yang di sepakati oleh kedua belah pihak pada dasarnya memuat dasar pokok tata aturan kerjasama dalam pengelolaan lahan rehabilitasi. Selain itu dalam surat pernyataan terdapat saksi-saksi yang mengetahui yaitu ketua kelompok tani, kepala resort dan kepala desa.

Pada kriteria kedua yaitu cara pengelolaan lahan rehab, persentase paling tinggi yaitu sebesar 65% pada skor nilai 4 yang artinya masuk pada kategori baik. Beberapa petani mengaku bahwa sudah mengetahui cara-cara pengelolaan lahan rehab yang sudah mereka pelajari dari kebiasaan dan turun temurun. Awal kegiatan pengelolaan lahan rehab dimulai yaitu sekitar tahun 1999-2000 dan diteruskan sampai sekarang. Petani beranggapan bahwa mereka sudah paham kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh pihak taman nasional seperti jarak tanam, tanaman pokok yang dilarang ditanam dan cara merawat tanaman pokok tersebut. Akan tetapi, petani juga mengaku

perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan dan pembaruan/inovasi cara pengelolaan lahan rehab yang nantinya akan menguntungkan petani dan juga taman nasional. Pengelolaan lahan rehab ini dilakukan dengan bentuk pengelolaan bersama yaitu antara masyarakat dengan pihak pemangku kawasan hutan yaitu pihak Taman Nasional. Salah satu cara untuk mewujudkan keberhasilan rehabilitasi lahan adalah melalui kerjasama antara masyarakat desa hutan dan pihak Taman Nasional, dengan membuat surat pernyataan. Di dalam surat pernyataan pada dasarnya memuat dasar pokok tata aturan kerjasama dalam pengelolaan lahan rehabilitasi. Hal-hal pokok yang termuat dalam surat pernyataan tersebut, diantaranya menyangkut kewajiban masing-masing pihak, hak-hak yang diterima oleh masing-masing pihak, larangan dan aturan sanksi.

Pada kriteria ketiga, sosialisasi pihak taman nasional, persentase paling tinggi yaitu sebesar 55% pada skor nilai 4 yang artinya masuk pada kategori baik.. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa petani mengaku bahwa sosialisasi taman nasional sudah cukup terjadwal dan teratur. Bentuk sosialiasi yang dilakukan yaitu apabila sosialisasi pihak taman nasional tidak menggunakan cara mengumpulkan semua petani, akan tetapi dengan cara membentuk kelompok tani dimana nantinya petani dapat memperoleh informasi dari setiap kelompok tani yang ada. Petani mengharapkan dukungan dan dorongan pihak taman nasional karena kerjasama ini juga nantinya akan berdampak pada taman nasional. Sosialisasi pihak taman nasional dilakukan apabila terdapat program baru ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Biasanya sosialisasi dilakukan satu bulan sekali dan pihak taman nasional hanya mengundang ketua kelompok tani saja, dan nanti hasil sosialiasi akan di jelaskan oleh masing-masing ketua kelompok tani pada anggotanya. Sosialisasi ini sudah dirasa cukup oleh petani karena dapat berjalan efektif tanpa mengundang semua petani yang ikut dalam kerjasama pengelolaan lahan rehab, sehingga sosialisasi berjalan kondusif.

## 2. Manfaat Kerjasama

Manfaat kerjasama merupakan dampak positif yang dihasilkan dari kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati bersama. Manfaat kerjasama diharapkan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu petani lahan rehab dan pihak Taman Nasional Meru Betiri atas dasar kesepahaman bersama berbasis kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung. Indikator manfaat kerjasama mempunyai 2 kriteria penilaian yaitu Meningkatkan pendapatan petani dan Pemulihan ekosistem. Berikut merupakan tabel penilaian dari indikator kontribusi tenaga tersaji dalam tabel 3.

**Tabel 3.** Penilaian Manfaat kerjasama dalam dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri

Kriteria Penilaian	Nilai					Rata-rata Skor
	1 (Tidak Baik)	2 (Kurang Baik)	3 (Cukup Baik)	4 (Baik)	5 (Sangat Baik)	
Meningkatkan pendapatan petani	0%	0%	7,5%	45%	47,5%	4,40
Pemulihan Ekosistem	0%	0%	15%	35%	50%	4,35
<b>Total</b>						<b>8,75</b>

Kriteria pengambilan keputusan kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dari indikator manfaat kerjasama:



1. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap manfaat kerjasama tidak baik (skor 2-4)
2. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap manfaat kerjasama kurang baik (skor 5-7)
3. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap manfaat kerjasama cukup baik (skor 8-10)
4. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap manfaat kerjasama baik (skor 11-13)
5. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap manfaat kerjasama sangat baik (skor 14-16)

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan penilaian terhadap manfaat kerjasama dengan melihat 2 kriteria penilaian yaitu 1) Meningkatkan pendapatan petani, 2) Pemulihan ekosistem. Hasil penilaian dari kedua kriteria yang telah dirata-rata dan kemudian dijumlahkan maka skor penilain yaitu 8,75. Artinya skor 8,75 tersebut masuk dalam cukup baik yaitu antara skor 8-10. Skor tersebut meunjukkan bahwa manfaat kerjasama dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dalam kategori cukup baik.

Pada kriteria pertama, meningkatkan pendapatan petani, persentase paling tinggi yaitu sebesar 47,5% pada skor nilai 5 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Petani lahan rehab beranggapan bahwa dengan adanya kerjasama dapat meningkatkan pendapatan. Petani memperoleh pendapatan dari hasil panen tanaman pokok yang sebagian besar berasal dari tanaman buah-buahan. Petani memanfaatkan hasil dari tanaman pokok dengan cara dijual ataupun di konsumsi pribadi. Tanaman pokok yang menghasilkan seperti pete, mengkudu, nangka dan asam. Selain itu petani mendapatkan pendapatan dari hasil panen tanaman semusim (palawija) yang diusahakan secara tumpang sari di sela-sela tanaman pokok. Tanaman semusim yang ditanam petani antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dll. Pada kenyataannya, pendapatan petani apabila dihitung per bulan, masih jauh dibawah UMR (Upah Minimum Regional) di Kabupaten Jember yaitu sekitar Rp. 1.900.000,00. Akan tetapi, petani beranggapan bahwa apa yang mereka dapatkan dari mengelola lahan rehab sudah dikatakan cukup, karena banyak masyarakat Desa Wonoasri yang berusia produktif tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang putus sekolah, buta huruf, dan sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, masyarakat sudah merasa cukup dengan mendapatkan penghasilan dari mengelola lahan rehab.

Pada kriteria kedua, pemulihan ekosistem, persentase paling tinggi yaitu sebesar 50% pada skor nilai 5 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Sebagian besar petani beranggapan bahwa memiliki tanggung jawab untuk ikut bersama-sama mengelola zona rimba taman nasional yang telah rusak karena penjarahan yang berlangsung di era reformasi agar ekosistem kembali pulih. Apabila ekosistem kembali pulih, maka manfaat dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik petani lahan rehab dan pihak taman nasional. Manfaat kerjasama yaitu adanya tambahan pendapatan keluarga petani lahan rehab, maka dipercaya akan menjadi faktor penggerak/pendorong bagi terwujudnya manfaat yaitu menghindarkan zona inti dari ancaman akan adanya penjarahan oleh masyarakat. Manfaat lainnya yaitu di masa depan, zona rehabilitasi dapat dikembalikan status dan fungsinya di zona rimba taman nasional. Sebagian kecil petani beranggapan kurang setuju dengan dampak pemulihan ekosistem karena apabila nantinya tanaman pokok sudah tumbuh lebat, maka petani tidak dapat menanam tanaman semusim karena kanopi akan menutup tanaman semusim sehingga mengakibatkan tanaman semusim tidak berproduksi dan menghasilkan kembali.

### 3 Hak Petani

Hak Petani merupakan segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap petani berdasarkan perjanjian kerjasama antara petani dan pihak taman nasional. Indikator hak petani mempunyai 4 kriteria penilaian yaitu Berhak memanen buah tanaman pokok, Berhak hasil panen tanaman sela, Menerima pembinaan dan bimbingan Taman Nasional, Menerima bantuan bibit PE. Berikut merupakan tabel penilaian dari indikator hak petani tersaji dalam tabel 4.

**Tabel 4.** Penilaian Hak Petani dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri

Kriteria Penilaian	Nilai					Rata-rata Skor
	1 (Tidak Baik)	2 (Kurang Baik)	3 (Cukup Baik)	4 (Baik)	5 (Sangat Baik)	
Berhak memanen buah tanaman pokok	0%	0%	20%	77,5%	2,5%	3,83
Berhak hasil panen tanaman sela	0%	0%	2%	30%	70%	4,7
Berhak Menerima pembinaan dan bimbingan Taman Nasional	0%	0%	0%	42,5%	57,5%	4,58
Berhak Menerima bantuan bibit PE	0%	5%	33%	48%	15%	3,73
<b>Total</b>						<b>16,83</b>

Kriteria pengambilan keputusan kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dari indikator hak kerjasama:

1. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap hak petani tidak baik (skor 4-7)
2. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap hak petani kurang baik (skor 8-11)
3. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap hak petani cukup baik (skor 12-15)
4. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap hak petani baik (skor 16-19)
5. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap hak petani sangat baik (skor 20-23)

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan penilaian terhadap hak petani dengan melihat empat kriteria penilaian yaitu 1) Berhak memanen buah tanaman pokok, 2) Berhak hasil panen tanaman sela, 3) Menerima pembinaan dan Bimbingan Taman Nasional 4) Menerima bantuan bibit PE. Berdasarkan hasil penilaian ketiga kriteria yang telah dirata-rata kemudian dijumlahkan maka hasil skor penilaian yaitu 16,83. Artinya skor 16,83 tersebut masuk dalam kategori baik yaitu antara skor 16-19. Skor tersebut meunjukkan bahwa hak petani dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri masuk dalam kategori baik.

Pada kriteria pertama, yaitu berhak memanen buah tanaman pokok, persentase paling tinggi yaitu sebesar 77,5% pada skor nilai 4 yang artinya masuk pada kategori baik. Petani menganggap bahwa mereka sangat berhak untuk mendapatkan buah tanaman pokok yang mereka tanam sendiri. Tanaman pokok yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh petani yaitu pete, mengkudu, nangka, asam dan mangga, sedangkan tanaman yang lain tidak menghasilkan buah. Sebagian petani beranggapan bahwa tanaman yang sudah berbuah saat ini masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala seperti sulitnya mencari tengkulak, sehingga petani merasa malas untuk memanen buah dan membiarkan buah menjadi busuk saat di masih pohon.

Pada kriteria kedua yaitu berhak hasil panen tanaman sela persentase paling tinggi yaitu sebesar 70% pada skor nilai 5 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Petani mengaku bahwa mereka sangat mengharapkan dari hasil produksi tanaman sela dibandingkan produksi tanaman pokok, karena mereka beranggapan bahwa tanaman sela lebih menghasilkan dengan waktu yang relatif cepat yaitu bisa memanen setiap satu musim. Tanaman sela yang diusahakan petani yaitu padi, jagung, terong, cabe, dll. Petani beranggapan pendapatan petani bisa bertambah karena hasil produksi tanaman sela yang bisa dinikmati semusim sekali, karena beberapa petani tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai lahan sawah di desa sehingga mereka sangat menggantungkan hidupnya dengan mengelola lahan rehab meskipun dengan jarak antara rumah dan lahan yang relatif jauh.

Pada kriteria ketiga yaitu berhak menerima pembinaan dan bimbingan pihak Taman Nasional, persentase paling tinggi yaitu sebesar 57,5% pada skor nilai 5 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Petani mengaku bahwa sangat membutuhkan pembinaan dan bimbingan taman nasional karena kerjasama ini tidak hanya petani yang melakukan, akan tetapi taman nasional juga sangat berperan. Petani beranggapan bahwa petani dan pihak taman nasional memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan dan memiliki tanggung jawab yang sama sehingga tujuan nantinya dapat dinikmati oleh taman nasional di masa depan, maupun oleh petani lahan rehab di masa sekarang dan masa depan. Petani lahan rehab tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan inovasi yang dilakukan yaitu melaksanakan tuntunan bimbingan teknis yang diberikan oleh para penyuluh karena para penyuluh juga giat melakukan upaya pendampingan terhadap aktivitas usahatani pada lahan rehab.

Pada kriteria keempat yaitu berhak menerima bantuan bibit PE, persentase paling tinggi yaitu sebesar 48% pada skor nilai 4 yang artinya masuk pada kategori baik. Banyak petani yang menyambut baik dengan adanya bantuan pemberian bibit tanaman pokok. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bibit tanaman pokok. Bibit tanaman pokok yang diberikan yaitu tanaman pakem, kluwih, mengkudu dan durian. Pemberian bibit disesuaikan dengan luas lahan rehab yang dimiliki petani. Beberapa petani beranggapan bahwa bibit yang berikan harus tahan terhadap cuaca dan tidak membutuhkan perawatan yang terlalu sulit agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Petani mengaku bibit tanaman yang saat ini diberikan kurang memberikan dampak yang positif karena tanaman tersebut buah dan bijinya kurang laku.

#### 4 Kewajiban Petani

Kewajiban Petani merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh semua petani lahan rehab agar bisa mendapatkan haknya secara layak dan dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Taman Nasional sebagai pihak ke-1 memberikan kewajiban yang harus diemban oleh petani lahan rehab yang nantinya. Indikator kewajiban petani mempunyai 9 kriteria penilaian yaitu Membentuk kelompok petani, Melakukan penanaman tanaman pokok, memelihara tanaman pokok, menjaga dan melindungi tanaman pokok, melapor bila ada tindak pidana kehutanan, tidak merusak tanaman pokok, dilarang merubah fungsi hutan menjadi lahan sawah, mengelola tanaman pokok sesuai perjanjian, bersedia menerima sanksi apabila melanggar. Berikut merupakan tabel penilaian dari indikator kontribusi tenaga tersaji dalam tabel 5.

**Tabel 5.** Penilaian Kewajiban Petani dalam dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri

Kriteria Penilaian	Nilai					Rata-rata Skor
	1 (Sangat Rendah)	2 (Rendah)	3 (Sedang)	4 (Tinggi)	5 (Sangat Tinggi)	
Kewajiban Membentuk kelompok tani	0%	0%	0%	37,5%	62,5%	4,63
Kewajiban melakukan penanaman tanaman pokok	0%	0%	5%	70%	25%	4,2
Kewajiban memelihara tanaman pokok	0%	5%	22,5%	35%	37,5%	4,05
Kewajiban menjaga dan melindungi tanaman pokok	0%	0%	37,5%	57,5%	5%	3,68
Kewajiban melapor bila ada tindak pidana kehutanan	0%	0%	12,5%	40%	47,5%	4,35
Kewajiban tidak merusak tanaman pokok	0%	0%	15%	45%	40%	4,25
Dilarang merubah fungsi hutan menjadi lahan sawah	0%	0%	0%	37,5%	62,5%	4,63
Mengelola tanaman pokok sesuai perjanjian	0%	0%	22,5%	42,5%	35%	4,13
Bersedia menerima sanksi apabila melanggar	0%	0%	7,5%	42,5%	50%	4,43
<b>Total</b>						<b>38,33</b>

Kriteria pengambilan keputusan kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dari indikator kewajiban petani :

1. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kewajiban kerjasama tidak baik (skor 9-16)
2. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kewajiban kerjasama kurang baik (skor 17-24)
3. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kewajiban kerjasama cukup baik (skor 25-32)
4. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kewajiban kerjasama baik (skor 33-40)
5. Persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kewajiban kerjasama sangat baik (skor 41-48)

Berdasarkan Tabel 3.4 menunjukkan penilaian terhadap kewajiban petani dengan melihat sembilan kriteria penilaian yaitu 1) Membentuk kelompok tani, 2) Melakukan penanaman tanaman pokok, 3) memelihara tanaman pokok, 4) menjaga dan melindungi tanaman pokok, 5) Melapor bila ada tindak pidana kehutanan, 6) Tidak merusak tanaman pokok, 7) Dilarang merubah fungsi hutan menjadi lahan sawah, 8) Mengelola tanaman pokok sesuai perjanjian, 9) Bersedia menerima sanksi apabila melanggar. Hasil penilaian Sembilan kriteria yang telah dirata-rata dan kemudian dijumlahkan maka hasil skor penilaian yaitu 38,33. Artinya skor 38,33 tersebut masuk dalam tinggi yaitu antara skor 33-40. Skor tersebut meunjukkan bahwa kewajiban petani dalam kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri masuk dalam kategori baik.

Pada kriteria pertama yaitu kewajiban membentuk kelompok tani, persentase paling tinggi yaitu sebesar 62,5% pada skor nilai 5 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Hampir seluruh petani lahan rehab beranggapan bahwa kelompok tani sangat diperlukan. Adanya kelompok tani akan memudahkan petani dalam berkomunikasi dan berkoordinasi antara pihak taman nasional dan LMDHK. Contohnya seperti kegiatan pembinaan kepada petani lahan rehab akan lebih efektif dan efisien apabila diakomodasi dalam wadah kelompok-kelompok tani. Beberapa petani mengharapkan pengurus kelompok tani maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDHK) ditempati oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan berorganisasi dan mampu mengkoordinir anggotanya sehingga kelompok tani berjalan dengan baik dan komunikasi dengan pihak taman nasional berjalan lancar. Mekanisme pembentukan Kelompok Tani Lahan Rehabilitasi yaitu Pihak Taman Nasional dalam aktivitas kerjasama pada lahan rehabilitasi melibatkan banyak masyarakat hutan atau petani hutan dan dibentuk dalam kelompok tani agar memudahkan koordinasi antara pihak taman nasional dan masyarakat. Kelompok tani di Desa Wonoasri terdiri dari 4 blok besar yaitu Blok , Bonangan, Blok Pletes, Blok Curah Malang dan Blok Pletes, dimana masing-masing setiap blok memiliki beberapa kelompok tani yang mengikuti kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi. Blok Bonangan terdiri dari 7 kelompok tani, Blok Curah Malang terdiri dari 2 kelompok tani, Blok Pletes terdiri dari 4 kelompok tani dan Blok Donglo terdiri dari 2 Kelompok Tani.

Pada kriteria kedua, kewajiban menanam tanaman pokok, persentase paling tinggi yaitu sebesar 70% pada skor nilai 4 yang artinya masuk pada kategori baik. Petani beranggapan bahwa kegiatan penanaman tanaman pokok yang dilakukan sudah sesuai dengan arahan taman nasional, seperti jarak tanam, lubang tanam (anjurannya tanam) dan juga penggunaan ajir. Penggunaan ajir dimaksud agar taman nasional bisa dengan mudah apabila dilakukan pengecekan pada tanaman pokok yang ditanam oleh petani lahan rehab. Jumlah minimal tanaman pokok yang ditanam yaitu sekitar 400 batang/hektar atau 100 batang/patok dan wajib di tanam oleh semua petani lahan rehab. Petani mengakui penanaman akan dilakukan secara bertahap karena banyaknya bibit yang harus ditanam. Bibit yang diberikan oleh pihak taman nasional dianggap melebihi kapasitas jumlah bibit yang harus ditanam. Petani juga melakukan penyulaman pada bibit yang sudah mati dengan cara menanam bibit yang belum ditanam, karena sebagian besar petani tidak sepenuhnya menanam bibit yang diberikan.

Pada kriteria ketiga, kewajiban memelihara tanaman pokok, persentase paling tinggi yaitu sebesar 37,5% pada skor nilai 5 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Petani beranggapan bahwa memelihara tanaman pokok merupakan salah satu bagian terpenting dalam keberhasilan kerjasama ini, karena apabila cara merawat dilakukan dengan benar, maka tanaman pokok akan tumbuh dengan baik. Petani juga mengaku bahwa akan terasa sia-sia apabila tidak merawat dengan baik karena proses menanam tanaman pokok membutuhkan tenaga yang besar. Sebagian besar petani juga mengaku jika banyak tanaman pokok yang sudah ditanam mengalami kematian, karena diakibatkan oleh cuaca atau musim kemarau sehingga tanaman kekurangan pasokan air. Petani mengeluh karena bibit tanaman pokok yang diarahkan taman nasional terlalu banyak sehingga banyak bibit yang tidak ditanam oleh petani. Saat musim kemarau, petani mengalami kesulitan mendapatkan air untuk menyirami tanaman sela maupun tanaman pokok. Beberapa petani mensiasati dengan mengambil air di aliran sungai kecil dengan menggunakan pompa diesel. Untuk tanaman pokok yang baru ditanam, petani menggunakan pelepah pisang yang diletakkan di dekat bibit dengan harapan air dari pelepah pisang dapat menyerap ke dalam tanah. Selain itu petani melakukan infus tanaman dengan menggunakan botol air mineral.

Pada kriteria keempat, kewajiban menjaga dan melindungi tanaman pokok, persentase paling tinggi yaitu sebesar 57,5% pada skor nilai 4 yang artinya masuk pada kategori baik. Menurut petani, menjaga dan melindungi tanaman pokok sudah dilakukan sejauh ini agar tanaman tidak mati. Petani menjaga tanaman pokok saat sedang mengolah tanaman semusimnya. Petani mengaku bahwa menjaga dan melindungi tanaman pokok yang baru ditanam sangat beresiko dari kematian, baik karena akibat cuaca maupun gangguan hewan liar seperti monyet, babi hutan dan tikus. Akan tetapi beberapa petani juga mengeluh karena sejauh ini tanaman yang sudah ditanam banyak yang mengalami kematian. Petani beranggapan bahwa tanaman yang diberikan kepada petani kurang tahan terhadap cuaca karena musim kemarau. Selain itu beberapa petani mengeluh jika banyak tanaman yang dibawa saat dari pos pengambilan bibit banyak yang mengalami kerusakan.

Pada kriteria kelima, kewajiban melapor bila ada tindak pidana kehutanan, persentase paling tinggi yaitu sebesar 47,5% pada skor nilai 5 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Petani beranggapan jika sudah merasa memiliki tanggung jawab menjaga taman nasional dari pihak-pihak yang ingin merusak hutan di area taman nasional. Petani akan melaporkan jika ada pihak yang ingin memanfaatkan hasil taman nasional dengan cara illegal, karena sampai saat ini masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari dalam kawasan Desa Wonoasri maupun dari luar. Petani beranggapan akan menegur atau mengingatkan oknum jika kesalahannya tidak berat, akan tetapi apabila melanggar dengan berat maka akan dilaporkan kepada pihak taman nasional.

Pada kriteria keenam, kewajiban tidak merusak tanaman pokok, persentase paling tinggi yaitu sebesar 47,5% pada skor nilai 6 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Petani mengaku jika tanaman yang mereka tanam akan dijaga dengan maksimal. Petani beranggapan bahwa bibit yang baru ditanam tidak akan mati jika terdapat banyak air dan bibit yang tahan terhadap hama dan penyakit. Akan tetapi petani merasa kurang optimis tanaman bisa hidup dengan baik melihat kondisi yang sekarang. Petani merasa bahwa ada beban resiko yang tinggi, karena apabila banyak tanaman yang mati akan di beri tindakan oleh taman nasional. Terdapat beberapa petani yang kenyataannya yang ceroboh dalam memelihara pohon pokok yaitu dengan menanam tanaman peje yang menyebabkan pertumbuhan tanaman pokok akan terhambat bahkan mati. Selain itu, pada kenyataannya banyak petani yang dengan sengaja merusak tanaman pokok seperti mencabut tanaman, sengaja membiarkan tanaman mati pada saat musim kemarau tanpa ada usaha untuk menyiram ataupun menyulam.

Pada kriteria ketujuh, kewajiban tidak merubah fungsi hutan menjadi lahan sawah, persentase paling tinggi yaitu sebesar 62,5% pada skor nilai 5 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Petani sadar jika fungsi hutan tidak bisa dirubah menjadi lahan sawah seperti di lahan sawah pada umumnya. Mereka merasa sangat bersyukur sudah diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam mengelola lahan rehab dan memanfaatkan hasilnya untuk dimanfaatkan oleh petani sehingga pendapatan petani bisa bertambah. Petani mengakui pentingnya taman nasional bagi warga sekitar sehingga tidak akan merusak dan menjarah area taman nasional. Terdapat beberapa petani yang merubah fungsi lahan yang seharusnya menanam tanaman pokok, akan tetapi menanam jeruk dan juga kopi karena mereka berpendapat bahwa dengan menanam tanaman tersebut akan lebih menguntungkan.

Pada kriteria kedelapan, kewajiban mengelola tanaman pokok sesuai perjanjian persentase paling tinggi yaitu sebesar 42,5% pada skor nilai 4 yang artinya masuk pada kategori baik. Petani beranggapan lahan rehab yang mereka kelola dan dimanfaatkan sudah dimulai sekitar tahun 1998 sampai sekarang, dan sebagian besar dari petani menggantungkan hidupnya dari hasil mengelola lahan rehab. Petani mengaku jika

tanaman pokok yang sudah tinggi tidak terlalu rapat sehingga masih bisa dimanfaatkan untuk mengolah tanaman sela. Petani sadar dan paham jika lahan rehabilitasi yang mereka kelola merupakan milik taman nasional, sehingga mereka akan mematuhi dengan mengelola tanaman pokok sesuai perjanjian.

Pada kriteria kesembilan, kewajiban bersedia menerima sanksi apabila melanggar persentase paling tinggi yaitu sebesar 50% pada skor nilai 5 yang artinya masuk pada kategori sangat baik. Petani mengungkapkan sanksi yang mereka terima apabila melanggar perjanjian akan diberi patok merah yang artinya mereka tidak boleh mengelola lahan rehab lagi. Ada petani yang sudah di sanksi karena melakukan pelanggaran dalam mengelola lahan rehab. Petani setuju dengan sanksi itu karena petani menyadari bahwa taman nasional mempunyai wewenang untuk menindak tegas petani yang membuat pelanggaran.

Secara keseluruhan penilaian kerjasama pengelolaan lahan rehab pada keempat indikator yaitu mekanisme kerjasama, manfaat kerjasama, hak petani, dan kewajiban petani masing-masing memiliki hasil yang berbeda-beda. Berikut merupakan penilaian dari keseluruhan indikator yang dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6.** Penilaian Persepsi Kerjasama Pengelolaan Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri

No	Indikator	Rata-Rata Skor
1	Mekanisme Kerjasama	12,6
2	Manfaat Kerjasama	8,75
3	Hak Petani	16,83
4	Kewajiban Petani	38,33
<b>Jumlah</b>		<b>76,51</b>

Kriteria pengambilan keputusan persepsi kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri:

1. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi tidak baik (skor 18-32)
2. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi kurang baik (skor 33-47)
3. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi cukup baik (skor 48-62)
4. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi baik (skor 63-77)
5. Tingkat persepsi petani Taman Nasional Meru Betiri terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi sangat baik (skor 78-92)

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan persepsi kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri yang dinilai 4 indikator yaitu mekanisme kerjasama, manfaat kerjasama, hak petani dan kewajiban petani. Tingkat persepsi petani memiliki nilai 76,51 yang artinya masuk kategori baik (skor 63-77).

Mekanisme kerjasama masuk dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petani sudah mengetahui mekanisme kerjasama yang dilakukan, yaitu dengan adanya peraturan pengelolaan lahan rehab yang dituangkan dalam surat pernyataan dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati baik dari pihak petani maupun pihak taman nasional. Petani beranggapan bahwa mereka sudah paham kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh pihak taman nasional seperti jarak tanam, tanaman pokok yang dilarang ditanam dan cara merawat tanaman pokok tersebut. Akan tetapi, petani juga mengaku perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan dan pembaruan/inovasi cara pengelolaan lahan rehab yang nantinya akan menguntungkan petani dan juga taman nasional. sosialisasi taman nasional sudah cukup

terjadwal dan teratur yang dilakukan satu bulan sekali dan pihak taman nasional hanya mengundang ketua kelompok tani saja, dan nanti hasil sosialisasi akan di jelaskan oleh masing-masing ketua kelompok tani pada anggotanya. Sosialisasi ini sudah dirasa cukup oleh petani karena dapat berjalan efektif tanpa mengundang semua petani yang ikut dalam kerjasama pengelolaan lahan rehab, sehingga sosialisasi berjalan kondusif.

Manfaat kerjasama masuk dalam kategori cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan akan menambah pendapatan petani. Petani memperoleh pendapatan dari hasil panen tanaman pokok yang sebagian besar berasal dari tanaman buah-buahan. Petani memanfaatkan hasil dari tanaman pokok dengan cara dijual ataupun di konsumsi pribadi. Petani merasakan ada tambahan pendapatan, padahal kenyataannya pendapatan petani apabila dihitung per bulan, masih jauh dibawah UMR (Upah Minimum Regional) di Kabupaten Jember yaitu sekitar Rp. 1.900.000,00. Akan tetapi, petani beranggapan bahwa apa yang mereka dapatkan dari mengelola lahan rehab sudah dikatakan cukup, karena banyak masyarakat Desa Wonoasri yang berusia produktif tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Selain menambah pendapatan, manfaat dari kerjasama ini adalah pemulihan ekosistem. Petani beranggapan bahwa memiliki tanggung jawab untuk ikut bersama-sama mengelola zona rimba taman nasional yang telah rusak karena penjarahan yang berlangsung di era reformasi agar ekosistem kembali pulih, agar di masa depan zona rehabilitasi dapat dikembalikan status dan fungsinya di zona rimba taman nasional.

Hak petani masuk dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani beranggapan hak yang harus diterima sudah dirasakan dampaknya oleh petani. Petani menganggap bahwa mereka sangat berhak untuk mendapatkan buah dari tanaman pokok yang sudah ditanam oleh mereka sendiri. Tanaman pokok yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh petani antara lain tanaman pete, mengkudu, nangka, asam dan mangga, sedangkan tanaman yang lain tidak menghasilkan buah. Akan tetapi, petani mengaku bahwa mereka sangat mengharapkan dari hasil produksi tanaman sela dibandingkan produksi tanaman pokok, karena mereka beranggapan bahwa tanaman sela lebih menghasilkan dengan waktu yang relatif cepat yaitu bisa memanen setiap satu musim. Petani lahan rehab tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan inovasi yang dilakukan yaitu melaksanakan tuntunan bimbingan teknis yang diberikan oleh para penyuluh karena para penyuluh juga giat melakukan upaya pendampingan terhadap aktivitas usahatani pada lahan rehab. Bibit tanaman pokok juga sudah diterima sepenuhnya oleh semua petani dan sudah dilakukan penanaman. Beberapa petani beranggapan bahwa bibit yang berikan harus tahan terhadap cuaca dan tidak membutuhkan perawatan yang terlalu sulit agar tanaman dapat tumbuh dengan baik . petani mengaku bibit tanaman yang saat ini diberikan kurang memberikan dampak yang positif karena tanaman tersebut buah dan bijinya kurang laku.

Kewajiban petani masuk dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani sebenarnya sudah paham kewajiban yang harus dilakukan dalam pengelolaan lahan rehab. Akan tetapi, kesadaran petani terhadap kesepahaman kerjasama masih relatif rendah karena kenyataannya banyak petani yang secara sengaja masih melanggar sejumlah aturan yang telah disepakati bersama antara petani dengan pihak taman nasional. Seperti contoh mencabut dan secara sengaja memperlakukan pohon ataupun bibit yang baru ditanam agar tanaman tersebut mati, karena mereka menganggap apabila tanaman pokok tumbuh bagus, kanopi daunnya akan menutupi tanaman semusim atau tanaman sela sehingga pertumbuhannya kurang bagus, hasil panen tidak optimal dan pendapatan mereka berkurang. Ada juga beberapa petani yang dengan sengaja mendirikan gubuk-gubuk dari bambu untuk tempat istirahat bagi petani saat mengelola lahan rehab. Padahal mendirikan gubuk sudah dilarang oleh pihak taman nasional.



#### 4. Kesimpulan

Tingkat persepsi petani terhadap pengelolaan lahan rehabilitasi secara keseluruhan diperoleh nilai sebesar 76,51 yang artinya termasuk dalam kategori baik. Meskipun persepsi petani terhadap kerjasama pengelolaan lahan rehabilitasi menunjukkan kategori yang baik, Akan tetapi, kesadaran petani terhadap kesepahaman kerjasama masih relatif rendah karena kenyataannya banyak petani yang secara sengaja masih melanggar sejumlah aturan yang telah disepakati bersama antara petani dengan pihak taman nasional.

#### Pustaka

- Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. 2014. Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu. Boyolali: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miftah, Toha. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, Semiar Aji. 2005. Taman Nasional, Hak-hak Masyarakat Setempat dan Pembangunan Regional. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 29 (3) : 269-288
- Rujito, Hari. 2016. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Model Desa Konservasi Dan Ekowisata Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. *Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*. Jember
- Tim Badan Litbang Kehutanan dan Taman Nasional Meru Betiri. 2011. *Review Tentang Illegal Logging Sebagai Ancaman Terhadap Sumberdaya Hutan Dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi (Redd) Di Indonesia*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
- Wanggai, F. 2009. *Manajemen Hutan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Berkelanjutan*. Jakarta: Grasindo